



BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyesuaikan inflasi harga Kabupaten Kotabaru dan sebagai efisiensi serta efektivitas penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja, perlu melakukan perubahan kembali terhadap Lampiran Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kotabaru terkait Kenaikan belanja tetap dan belanja variable serta Update kelompok Analisis Standar Belanja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 13
TAHUN 2013 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN KOTABARU

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 15 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 430) sebagaimana telah diubandengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 15 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 131, diubah sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Desember 2015

PENJ/4, T BUPATI KOTABARU

ISRA

Ditandatangani di Kotabaru
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

H. SURIANSYAH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2015 NOMOR °P"

PARAF KOORDINASI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI
 NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 KABUPATEN KOTABARU

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari ASB - yaitu ASB 01, ASB 02, ASB 04, ASB 08, ASB 09, ASB 21, ASB 36 dan ASB 37 yang dimaksudkan supaya menjadi acuan bagi TAPD untuk penyusun PPAS dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Masing-masing Analisa Standar Belanja (ASB) dari ASB - ASB 01, ASB 02, ASB 04, ASB 08, ASB 09, ASB 21, ASB 36 dan ASB 37 berturut-turut sebagai berikut :

ASB-001
 ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI

De skripsi:

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan barang non-konstruksi.

Pengendali belanja (*cost driver*):
 Nilai Non-Konstruksi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
 = Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel *variable cost* :

1,1236 x nilai non-konstruksi untuk sampai dengan Rp.	25.000.000
1,1183 x nilai non-konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp.	25.000.000 50.000.000
1,1130 x nilai non-konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp.	50.000.000 75.000.000
1,1036 x nilai non-konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp.	75.000.000 100.000.000
1,0991 x nilai non-konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp.	100.000.000 125.000.000
1,0973 x nilai non-konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp.	125.000.000 150.000.000
1,0916 x nilai non-konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp.	150.000.000 175.000.000
1,0898 x nilai non-konstruksi untuk Rp. sampai dengan Rp.	175.000.000 200.000.000

1,0820 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 225.000.000
1,0704 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 225.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000
1,0601 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 300.000.000
1,0504 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 400.000.000
1,0457 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 400.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
1,0307 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 800.000.000
1,0197 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 800.000.000 sampai dengan Rp. 900.000.000
1,0179 x nilai non-konstruksi untuk Rp. 900.000.000 sampai dengan Rp. 1.750.000.000
1,0161 x nilai non-konstruksi untuk Rp.1.750.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.000
1,0120 x nilai non-konstruksi untuk Rp.3.000.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000
1,0015 x nilai non-konstruksi untuk Rp.5.000.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000.000
1,0014 x nilai non-konstruksi untuk Rp.6.000.000.000 sampai dengan Rp. 6.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0	Y 1.1236 X
2	25,000,000	Y 1.1183 X
3	50,000,000	Y 1.1130 X
4	75,000,000	Y 1.1036 X
5	100,000,000	Y 1.0991 X
6	125,000,000	Y 1.0973 X
7	150,000,000	Y 1.0916 X
8	175,000,000	Y 1.0898 X
9	200,000,000	Y 1.0820 X
10	225,000,000	Y 1.0704 X
11	250,000,000	Y 1.0601 X
12	300,000,000	Y 1.0504 X
13	400,000,000	Y 1.0307 X
14	500,000,000	Y 1.0307 X

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
15	800,000,000 < X < 900,000,000	Y 1.0197 = X
16	900,000,000 < X < 1.750,000,000	Y 1.0179 = X
17	1.750,000,000 < X < 3.000,000,000	Y 1.0161 = X
18	3.000,000,000 < X < 5.000,000,000	Y 1.0120 = X
19	5.000,000,000 < X < 6.000,000,000	Y 1.0015 = X
20	6.000,000,000 < X < 6.500,000,000	Y 1.0014 = X

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai non-konstruksi harus didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam Tabel 1.

Tabel 1. Batasan Alokasi Ob ek Belan a:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	44,14%	0,00%	100,00%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	4,71%	0,00%	31,32%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	25,49%	0,00%	100,00%
4	Belanja Jasa Kantor	11,63%	0,00%	73,46%
5	Belanja Cetak Penggandaan	5,25%	0,00%	21,09%
6	Belanja Makan dan Minum	6,16%	0,00%	30,79%
7	Belanja Perjalanan Dinas	2,62%	0,00%	25,06%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan den an ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Non-Konstruksi	1.000.000	6.500.000.000

Contoh Kegiatan ASB 001:

No	SKPD	Kegiatan
1	Inspektorat Kabupaten	Pengadaan Buku/ Kepustakaan
2	Kecamatan Pulau Laut Tengah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3	Kecamatan Pulau Laut Timur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4	Badan Kepegawaian Daerah	Pengadaan Buku/ Kepustakaan

No	SKPD	Kegiatan
5	Kecamatan Pamukan Barat	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
6	Kecamatan Pulau Laut Selatan	Pengadaan Mebeleur
7	Kecamatan Kelumpang Barat	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
8	Kecamatan Pulau Sebuku	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9	Dinas Kesehatan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengadaan Buku/ Kepustakaan
11	Inspektorat Kabupaten	Pengadaan Mebeleur
12	Kecamatan Pulau Sebuku	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13	Kecamatan Pulau Laut Barat	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14	Kecamatan Kelumpang Hilir	Pengadaan Mebeleur
15	Kecamatan Pamukan Selatan	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
16	Kecamatan Kelumpang Hulu	Pengadaan Mebeleur
17	Dinas Peternakan	Pengadaan Buku/ Kepustakaan
18	Kecamatan Kelumpang Barat	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
19	Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
20	Kecamatan Pulau Laut Barat	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
21	Dinas Perkebunan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
22	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
23	Kecamatan Pulau Sebuku	Pengadaan Mebeleur
24	Kecamatan Pulau Laut Selatan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
25	Kecamatan Sampanahan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
26	Kecamatan Pamukan Selatan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
27	Kecamatan Pamukan Barat	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28	Kecamatan Pulau Laut Timur	Pengadaan Mebeleur
29	Dinas Perkebunan	Pengadaan Buku/ Kepustakaan

No	SKPD	Kegiatan
30	Kecamatan Pamukan Utara	Pengadaan Mebeleur
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
32	Kecamatan Sungai Durian	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
33	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan Buku/ Kepustakaan
34	Kecamatan Kelumpang Selatan	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
35	Kecamatan Hampang	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
36	Kecamatan Pamukan Utara	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
37	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengadaan Mebeleur
38	Kecamatan Sampanahan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
39	Kecamatan Kelumpang Tengah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
40	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
41	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
42	Dinas Pertanian	Pengadaan Mebeleur
43	Kecamatan Pamukan Barat	Pengadaan Mebeleur
44	Kecamatan Pulau Sembilan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
45	Kecamatan Sungai Durian	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
46	Dinas Kehutanan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
47	Kecamatan Sungai Durian	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
48	Kecamatan Kelumpang Barat	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
49	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50	Badan Kepegawaian Daerah	Pengadaan Mebeleur
51	Kecamatan Kelumpang Selatan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
52	Kecamatan Kelumpang Utara	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
53	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	Pengadaan Mebeleur

No	SKPD	Kegiatan
54	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Pengadaan Mebeleur
55	Kecamatan Pulau Laut Utara	Pengadaan Mebeleur
56	Kecamatan Pamukan Selatan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
57	Dinas Pendapatan Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
58	Kecamatan Kelumpang Hilir	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
59	Kecamatan Kelumpang Tengah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
60	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
61	Kecamatan Pulau Sembilan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
62	Kecamatan Sungai Durian	Pengadaan Mebeleur
63	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	Pengadaan Mebeleur
64	Kecamatan Pamukan Selatan	Pengadaan Mebeleur
65	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
66	Dinas Peternakan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
67	Dinas Pertambangan Dan Energi	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
68	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Pengadaan Mebeleur
69	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
70	Kecamatan Pamukan Utara	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
71	Kecamatan Pulau Sembilan	Pengadaan Mebeleur
72	Kecamatan Pulau Laut Timur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
73	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
74	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	Pengadaan mebeleur rumah sakit
75	Dinas Kehutanan	Pengadaan Mebeleur
76	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
77	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

No	SKPD	Kegiatan
78	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
79	Dinas Peternakan	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
80	Kecamatan Kelumpang Hulu	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
81	Dinas Kehutanan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
82	Kecamatan Kelumpang Utara	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
83	Dinas Perdagangan Dan Pasar	Pengadaan Mebeleur
84	Kecamatan Pulau Laut Selatan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
85	Kecamatan Kelumpang Barat	Pengadaan Mebeleur
86	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal	Pengadaan Mebeleur
87	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
88	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Mebeleur
89	Kecamatan Kelumpang Selatan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
90	Inspektorat Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
91	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
92	Kecamatan Pamukan Barat	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
93	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
94	Dinas Perdagangan Dan Pasar	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
96	Badan Kepegawaian Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
97	Kecamatan Kelumpang Hulu	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

No	SKPD	Kegiatan
98	Kecamatan Hampang	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
99	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	Pengadaan Mebeleur
101	Dinas Pertambangan Dan Energi	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
102	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
103	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
104	Dinas Perkebunan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
105	Dinas Pertanian	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
106	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
107	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
108	Kecamatan Kelumpang Hilir	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
109	Dinas Perkebunan	Pengadaan Mebeleur
110	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
111	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
112	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan buku/kepustakaan
113	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
114	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengadaan peralatan gedung kantor
115	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pengadaan Mebeleur
116	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pengadaan Mebeleur
117	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	Pengadaan alat-alat rumah sakit
118	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

No	SKPD	Kegiatan
119	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
120	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
121	Dinas Peternakan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
122	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan Mebeleur
123	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
124	Dinas Pendapatan Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
125	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
126	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
127	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
128	Sekretariat Daerah	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
129	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan Peralatan Petugas Keamanan / Satpol PP
130	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
131	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
132	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan	Pengadaan Mebeleur
133	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
134	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Penyediaan Peraga IPA Tingkat untuk SD/MI
135	Badan Kepegawaian Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
136	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Rapor ; Ijazah; STTB ; STL SD/MI ; SLTP dan SLTA
137	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja
138	Sekretariat Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
139	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

No	SKPD	Kegiatan
140	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Mebeluer Sekolah
141	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
142	Sekretariat Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
143	Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informasi	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Untuk Informasi / Media Massa
144	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan mebeluer sekolah
145	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
146	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
147	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
148	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

ASB-002

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan konstruksi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

A. BANGUNAN SEDERHANA

1.1400 x nilai konstruksi untuk dengan Rp. 250.000.000	sampai
1.1000 x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 dengan Rp. 500.000.000	sampai
1.0675 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 dengan Rp. 1.000.000.000	sampai
1.0420 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 dengan Rp. 2.500.000.000	sampai
1.0285 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 dengan Rp. 5.000.000.000	sampai
1.0190 x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 dengan Rp. 10.000.000.000	sampai

1.0120 x nilai konstruksi untuk Rp. 10.000.000.000
sampai dengan Rp. 25.000.000.000
1.0080 x nilai konstruksi untuk Rp. 25.000.000.000 sampai
dengan Rp. 50.000.000.000
1.0050 x nilai konstruksi untuk Rp. 50.000.000.000 sampai
dengan Rp. 100.000.000.000

Rumus Pen hitun an Belan a Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X	Y 1.1400 = X
2	250,000,000 < X	Y 1.1000 = X
3	500,000,000 < X	Y 1.0675 = X
4	1.000,000,000 < X	Y 1.0420 = X
5	2,500,000,000 < X	Y 1.0285 = X
6	5.000,000,000 < X	Y 1.0190 = X
7	10.000,000,000 < X	Y 1.0120 = X
8	25,000,000,000 < X	Y 1.0080 = X
9	50,000,000,000 < X	Y 1.0050 = X

B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

1.1600 x nilai konstruksi untuk dengan Rp. 250.000.000	sampai
1.1125 x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 dengan Rp. 500.000.000	sampai
1.0775 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 dengan Rp. 1.000.000.000	sampai
1.0510 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 dengan Rp. 2.500.000.000	sampai
1.0328 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 dengan Rp. 5.000.000.000	sampai
1.0215 x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 dengan Rp. 10.000.000.000	sampai
1.0142 x nilai konstruksi untuk Rp. 10.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000	
1.0093 x nilai konstruksi untuk Rp. 25.000.000.000 dengan Rp. 50.000.000.000	sampai
1.0058 x nilai konstruksi untuk Rp. 50.000.000.000 dengan Rp. 100.000.000.000	sampai

Rumus Pen hitun an Belan a Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < 250,000,000	Y 1.1600 = X
2	250,000,000 < 500,000,000	Y 1.1125 = X
3	500,000,000 < 1.000,000,000	Y 1.0775 = X
4	1.000,000,000 < 2,500,000,000	Y 1.0510 = X
5	2,500,000,000 < 5,000,000,000	Y 1.0328 = X
6	5.000,000,000 < 10.000,000,000	Y 1.0215 = X
7	10.000,000,000 < 25,000,000,000	Y 1.0142 = X
8	25,000,000,000 < 50,000,000,000	Y 1.0093 = X
9	50,000,000,000 < 100,000,000,000	Y 1.0058 = X

C. BANGUNAN KHUSUS

1.1600 x nilai konstruksi untuk dengan Rp. 250.000.000	sampai
1.1125 x nilai konstruksi untuk Rp. 250.000.000 dengan Rp. 500.000.000	sampai
1.0775 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000 dengan Rp. 1.000.000.000	sampai
1.0510 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 dengan Rp. 2.500.000.000	sampai
1.0328 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 dengan Rp. 5.000.000.000	sampai
1.0215 x nilai konstruksi untuk Rp. 5.000.000.000 dengan Rp. 10.000.000.000	sampai
1.0142 x nilai konstruksi untuk Rp. 10.000.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000.000	
1.0093 x nilai konstruksi untuk Rp. 25.000.000.000 dengan Rp. 50.000.000.000	sampai
1.0058 x nilai konstruksi untuk Rp. 50.000.000.000 dengan Rp. 100.000.000.000	sampai

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 <X 250,000,000	Y 1.1600 X
2	250,000,000 <X 500,000,000	Y 1.1125 X
3	500,000,000 <X 1.000,000,000	Y 1.0775 X
4	1.000,000,000 <X 2,500,000,000	Y 1.0510 X
5	< X 5,000,000,000	Y 1.0328

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
	2,500,000,000 <	= X
6	5.000,000,000 < X < 10.000,000,000	Y 1.0215 = X
7	10.000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y 1.0142 = X
8	25,000,000,000 < X < 50,000,000,000	Y 1.0093 = X
9	50,000,000,000 < X < 100,000,000,000	Y 1.0058 = X

D. JALAN

1.0677 x nilai konstruksi untuk	sampai
dengan Rp. 500.000.000	
1.0535 x nilai konstruksi untuk Rp. 500.000.000	sampai
dengan Rp. 750.000.000	
1.0325 x nilai konstruksi untuk Rp. 750.000.000	sampai
dengan Rp. 1.000.000.000	
1.0191 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000	sampai
dengan Rp. 30.000.000.000	
1.0022 x nilai konstruksi untuk Rp 30.500.000.000	sampai
dengan Rp. 40.000.000.000	
1.0018 x nilai konstruksi untuk Rp.40.000.000.000	sampai
dengan Rp. 60.000.000.000	
1.0016 x nilai konstruksi untuk Rp.60.000.000.000	sampai
dengan Rp. 97.000.000.000	

Rumus Pen hitun an Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
	< X	1.0677
1	0 < 500,000,000	Y = X
	< X	1.0535
2	500,000,000 < 750,000,000	Y = X
	< X	1.0325
3	750,000,000 < 1.000,000,000	Y = X
	< X	1.0191X
4	1.000,000,000 < 30,000,000,000	Y = 1.0191X
	< X	1.0022
5	30,000,000,000 < 40,000,000,000	Y = X
	< X	1.0018
6	40,000,000,000 < 60,000,000,000	Y = X
	< X	1.0016
7	60,000,000,000 < 97,000,000,000	Y = X

E. JEMBATAN

1.1108 x nilai konstruksi untuk	sampai
<u>dengan Rp. 1.500.000.000</u>	
1.0253 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.500.000.000	sampai
<u>dengan Rp. 15.000.000.000</u>	
1.0170 x nilai konstruksi untuk Rp.15.000.000.000	sampai
<u>dengan Rp. 28.000.000.000</u>	

Rumus Pen hitun an Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 1.500,000,000	Y = X 1.156
2	1.500,000,000 < X < 15.000,000,000	Y = X 1.062
3	15,000,000,000 < X < 28,000,000,000	Y = X 1.006

F. DERMAGA

1.1422 x nilai konstruksi untuk < X < 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.0369 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 4.000.000.000
1.0210 x nilai konstruksi untuk Rp. 4.000.000.000 sampai dengan Rp. 10.500.000.000

Rumus Pen hitun an Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 1.000,000,000	Y = X 1.1422
2	1.000,000,000 < X < 4,000,000,000	Y = X 1.0369
3	4,000,000,000 < X < 10,500,000,000	Y = X 1.0210

G. IRIGASI DAN DRAINASE

1.1452 x nilai konstruksi untuk < X < 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000
1.0842 x nilai konstruksi untuk Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000
1.0666 x nilai konstruksi untuk Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000.000

Rumus Pen hitun an Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 1.000,000,000	Y = X 1.1452
2	1.000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = X 1.0842
3	2,500,000,000 < X < 6.000,000,000	Y = X 1.0666

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 2 berikut

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,33%	0,00%	3,58%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	3,63%	0,00%	4,36%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	20,78%	0,00%	73,91%
4	Belanja Jasa Kantor	3,32%	0,00%	7,89%
5	Belanja Cetak Penggandaan	0,08%	0,00%	0,18%
6	Belanja Makan dan Minum	0,44%	0,00%	0,94%
7	Belanja Perjalanan Dinas	4,89%	3,05%	6,73%
8	Belanja Barang Yang Diserahkan Pihak Ketiga	65,54%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

- Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Jasa Pihak Ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja Jasa Pihak Ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
- ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Konstruksi	4.720.000	170.730.716.475

Contoh Kegiatan ASB 002 :

No	SKPD	Kegiatan
1	Inspektorat Kabupaten	Pembangunan Gedung Kantor
2	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Pembangunan Gedung Kantor
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Pembangunan Gedung Kantor
4	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pembangunan Gedung Kantor
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pembangunan Gedung Kantor
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Gedung Kantor
7	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pembangunan Gedung Kantor
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pembangunan Gedung Kantor
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembangunan Gedung Kantor

No	SKPD	Kegiatan
10	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	Pembangunan Gedung Kantor
11	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	Pembangunan Gedung Kantor
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pembangunan Gedung Kantor
13	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pembangunan Gedung Kantor
14	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
15	Dinas Kesehatan	Pembangunan Gedung Kantor
16	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	Pembangunan Sarana Pendukung Terminal
17	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (Fasilitasi Biaya Umum DAK)
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pembangunan Gedung Kantor
19	Sekretariat Daerah	Pembangunan Gedung Kantor
20	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	Pembangunan Halte bus, taxigedung terminal
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
22	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Kantor
23	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi DAK dan Pendamping)
24	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
25	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Prasarana Peningkatan Akses Mutu Pendidikan (Fasilitasi DAK dan Pendamping)
26	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
27	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
28	Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
29	Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

No	SKPD	Kegiatan
30	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
31	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
32	Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Fasilitasi Biaya Umum DAK)
33	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan gedung asrama siswa
34	Dinas Pertanian	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
35	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
36	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Peningkatan Jalan (Fasilitasi DAK dan Pendamping)
37	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
38	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
39	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
40	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
41	Dinas Peternakan	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
42	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
43	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Guru Sekolah
44	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK dan Pendamping)
45	Dinas Kesehatan	Pembangunan Posyandu/ Polindes
46	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB
47	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
48	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (DAK dan Pendamping)
49	Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

No	S KIDD	Kegiatan
50	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
51	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Sekolah
52	Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK dan Pendamping)
53	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
54	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
55	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Pembangunan prasarana pengaman pantai
56	Dinas Pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
57	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Sekolah
58	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
59	Dinas Perdagangan Dan Pasar	Pembangunan Pasar
60	Dinas Perkebunan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan
61	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	Pembangunan Dermaga
62	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembangunan Prasarana Peningkatan Akses Mutu Pendidikan (DAK dan Pendamping)
63	Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan	Pembangunan Jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan
64	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Pembangunan jalan
65	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Peningkatan Jalan (DAK dan Pendamping)
66	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Pembangunan jembatan
67	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Peningkatan Jalan
68	Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan	Pembangunan/ peningkatan infrastruktur

ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Bahan Material merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan bahan material.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Bahan Material

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pen endali belan a variabel (*variable cost*):

1,1249 x nilai bahan material untuk sampai dengan Rp. 25.000.000	
1,0820 x nilai bahan material untuk Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000	
1,0657 x nilai bahan material untuk Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 75.000.000	
1,0615 x nilai bahan material untuk Rp. 75.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000	
1,0521 x nilai bahan material untuk Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 125.000.000	
1,0512 x nilai bahan material untuk Rp. 125.000.000 sampai dengan Rp. 300.000.000	
1,0500 x nilai bahan material untuk Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	
1,0448 x nilai bahan material untuk Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000	
1,0412 x nilai bahan material untuk Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000.000	
1,0234 x nilai bahan material untuk Rp.2.000.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.000	
1,0170 x nilai bahan material untuk Rp.3.000.000.000 sampai dengan Rp. 5.500.000.000	
1,0128 x nilai bahan material untuk Rp.5.500.000.000 sampai dengan Rp. 7.500.000.000	

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Bahan Material (X)	Pagu Belanja (Y)
	<X	Y 1.1249
1	0 25,000,000	X
	<X	Y 1.0820
2	25,000,000 50,000,000	X
	<X	Y 1.0657
3	50,000,000 75,000,000	X
	<X	Y 1.0615
4	75,000,000 100,000,000	X
	<X	Y 1.0521
5	100,000,000 125,000,000	X
	<X	Y 1.0512
6	125,000,000 300,000,000	X

No.	Nilai Bahan Material (X)	Pagu Belanja (Y)
7	300,000,000 < X	Y 1.0500 = X
8	500,000,000 < X	Y 1.0448 = X
9	1.000,000,000 < X	Y 1.0412 = X
10	2.000,000,000 < X	Y 1.0234 = X
11	3.000,000,000 < X	Y 1.0170 = X
12	5.500,000,000 < X	Y 1.0128 = X

Nilai keseluruhan tersebut selain nilai bahan material hams didistribusikan dalam alokasi sebagaimana diatur dalam Tabel 4.

Tabel 4. Batasan Alokasi Ob ek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2,77%	1,86%	3,67%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,37%	0,00%	1,64%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,00%	0,00%	8,50%
4	Belanja Jasa Kantor	72,81%	0,00%	100,00%
5	Belanja Cetak Penggandaan	0,58%	0,00%	1,53%
6	Belanja Makan dan Minum	5,99%	0,00%	18,56%
7	Belanja Perjalanan Dinas	13,48%	3,93%	23,02%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan den an ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai Bahan Material	25.000.000	7.500.000.000

Contoh Ke iatan ASB 004:

No	SKPD	Kegiatan
1	Dprd Kab.Kotabaru & Sekretariat Dprd	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2	Inspektorat	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
3	Rumah Sakit Umum	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
4	Rumah Sakit Umum	Pengadaan pakaian kerja lapangan
5	Rumah Sakit Umum	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik

No	SKPD	Kegiatan
		esensial
6	Rumah Sakit Umum	Pengadaan obat obatan rumah sakit
7	Rumah Sakit Umum	Pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit
8	Sekda - Bagian Umum	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
9	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
10	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadaan Pakaian kerja lapangan
11	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
12	Kantor Perpustakaan Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
13	Kantor Ketahanan Pangan	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
15	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pengadan pakaian dinas bagi aparatur pemerintahan desa
16	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan pakaian kerja lapangan
18	Badan Kepegawaian Daerah	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
19	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pengadaan pakaian kerja lapangan
20	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
21	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
22	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	Pengadaan alat kontrasepsi
23	Badan Komunikasi, Informatika, Arsip, Dan Sandi Daerah	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
24	Bappeda	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya

No	SKPD	Kegiatan
25	Dinas Kesehatan	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
26	Dinas Kesehatan	Pengadaan pakaian kerja lapangan
27	Dinas Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
28	Dinas Pertambangan Dan Energi	Pengadaan Pakaian kerja lapangan
29	Dinas Perhubungan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
30	Dinas Perhubungan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
31	Dinas Pekerjaan Umum	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
32	Dinas Pekerjaan Umum	Pengadaan Pakaian kerja lapangan
33	Dinas Tata Kota Dan Perumahan	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
34	Dinas Pendidikan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
35	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Pengadaan pakaian kerja lapangan
36	Dinas Kehutanan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
37	Dinas Kehutanan	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
38	Dinas Perkebunan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
39	Dinas Peternakan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
40	Dinas Peternakan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
41	Dinas Peternakan	Pengadaan ternak unggul
42	Dinas Pertanian	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
43	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
44	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengembangan SDI dan Pelestarian perairan umum
45	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan pakaian korpri
46	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
47	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya

No	SKPD	Kegiatan
48	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
49	Dinas Koperasi, Ukm Dan Industri	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
50	Dinas Koperasi, Ukm Dan Industri	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
51	Dinas Perdagangan, Penanaman Modal, Dan Pengelolaan Pasar	Pengadaan Pakaian dinas berserta perlengkapannya
52	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

ASB-008
PELATIHAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Non-Pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Non-Pegawai yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta Pelatihan, Hari Pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 232.600,00 per Peserta Pelatihan per Hari Pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 232.600,00 x Jumlah Peserta Pelatihan x Hari Pelatihan).

Tabel 8. Batasan Alokasi Ob ek Belan a

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,72%	0,00%	10,14%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,51%	1,64%	3,38%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,55%	0,00%	9,86%
4	Belanja Jasa Kantor	19,36%	0,00%	60,05%
5	Belanja Cetak Penggandaan	3,50%	0,00%	9,89%
6	Belanja Makan dan Minum	10,27%	0,00%	20,62%

	Belanja Perjalanan Dinas	56,09%	24,17%	88,01%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Bahan Material, Sewa, dan Pakaian Kerja. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan Bahan Material, Sewa, dan Pakaian Kerja dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Contoh Kegiatan ASB 008:

NO.	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
2	Dinas Kesehatan	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
4	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
5	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
6	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
7	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
12	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
13	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pelatihan keterampilan bagi pemuda

NO.	SKPD	Kegiatan
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	desiminas Wawasan Kebangsaan Dalam Upaya Memperkuat Ketahanan Budaya dan Ekonomi Masyarakat
15	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
17	Dinas Pertanian	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
18	Dinas Peternakan	Pertemuan/Pelatihan Medis Veteriner dan Kader Vaksinator
19	Dinas Peternakan	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
20	Dinas Perkebunan	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bimbingan Teknis Aplikasi Dalam Upaya Peningkatan Teknik Penangkapan

ASB-009
SOSIALISASI

De skripsi:

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk satuan kerja perangkat daerah kepada pegawai/masyarakat melalui tatap muka. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan memiliki pengetahuan terhadap program/produk yang disampaikan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 142.550,00 per Peserta, per Frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 142.550,00x Jumlah Peserta x Frekuensi Kegiatan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Ob ek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13,82%	0,00%	54,51%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,95%	0,00%	6,18%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,71%	0,31%	7,11%
4	Belanja Jasa Kantor	10,23%	0,00%	20,64%
5	Belanja Cetak Pengandaan	3,86%	0,00%	11,54%
6	Belanja Makan dan Minum	16,34%	0,00%	44,33%
7	Belanja Perjalanan Dinas	50,08%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja Bahan Material dan Sewa.. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan belanja Bahan Material dan Sewa, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Contoh Kegiatan ASB 009

NO.	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan kelembagaan di bidang pendidikan
2	Dinas Kesehatan	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
3	Dinas Cipta Karya, Pemukiman dan Perumahan	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
4	Dinas Perhubungan	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil
6	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
7	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sosialisasi, Publikasi, Koordinasi Kegiatan Transmigrasi dan Rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM)
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

NO.	SKPD	Kegiatan
	Perindustrian dan Perdagangan	
10	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
11	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
13	Sekretariat Daerah	Penyuluhan Hukum Pertanahan
14	Sekretariat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Otonom
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
16	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	Sosialisasi/Penyuluhan dan Penyebaran informasi peraturan daerah tentang perijinan dan layanan perijinan
17	Dinas Peternakan	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak
18	Dinas Pertambangan dan Energi	Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
21	Dinas Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan kelembagaan di bidang pendidikan
22	Dinas Kesehatan	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
23	Dinas Cipta Karya, Pemukiman dan Perumahan	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
24	Dinas Perhubungan	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan
25	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil
26	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

NO.	SKPD	Kegiatan
27	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
28	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sosialisasi, Publikasi, Koordinasi Kegiatan Transmigrasi dan Rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM)
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
30	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
31	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
33	Sekretariat Daerah	Penyuluhan Hukum Pertanahan
34	Sekretariat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Otonom
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
36	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal	Sosialisasi/Penyuluhan dan Penyebaran informasi peraturan daerah tentang perijinan dan layanan perijinan
37	Dinas Peternakan	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak
38	Dinas Pertambangan dan Energi	Sosialisasi Mitigasi Bencana Geologi
39	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
41	Dinas Pendidikan	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan kelembagaan di bidang pendidikan
42	Dinas Kesehatan	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
43	Dinas Cipta Karya, Pemukiman dan Perumahan	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

NO.	SKPD	Kegiatan
44	Dinas Perhubungan	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan
45	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil
46	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

ASB-021
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Evaluasi program/ kegiatan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi sebuah program/ kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut .

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Program/kegiatan yang dievaluasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 288.600,00 per jumlah program/kegiatan yang dievaluasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0,00 + (Rp. 288.600,00 x Jumlah program/kegiatan yang dievaluasi)

Tabel 21. Batasan Alokasi Ob ek Belan a

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	34,40%	16,24%	52,56%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,82%	1,81%	3,83%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,88%	0,54%	1,22%
4	Belanja Jasa Kantor	21,97%	1,04%	42,90%
5	Belanja Cetak Penggandaan	1,13%	0,11%	2,16%
6	Belanja Makan dan Minum	3,51%	2,12%	4,89%

	Belanja Perjalanan Dinas	35,28%	14,96%	55,60%
	Jumlah	100,00%		

Keterangan :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah program/ kegiatan yang dievaluasi	55	249

Contoh Kegiatan ASB 021:

No.	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi RKPD
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD

ASB-036
PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan teknis atau non-teknis atau keagamaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Pegawai yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 401.350,00 per Jumlah pegawai yang dibina per Durasi pembinaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp 0,00 + (Rp. 401.350,00 x Jumlah pegawai yang dibina x
 Durasi pembinaan)

Tabel 36. Batasan Alokasi Objek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,37%	1,36%	9,38%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,80%	0,00%	0,96%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,37%	1,18%	5,56%
4	Belanja Jasa Kantor	8,76%	3,52%	14,00%
5	Belanja Cetak Penggandaan	2,85%	0,14%	5,55%
6	Belanja Makan dan Minum	13,76%	0,00%	29,83%
7	Belanja Perjalanan Dinas	65,10%	10,60%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Pegawai yang Dibina	30 Orang	500 Orang
Durasi Pembinaan	1 bulan	12 bulan

Contoh Kegiatan ASB 036:

NO.	SKPD	KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	pembinaan/Fasilitasi Pelaksanaan Dana Alokasi Desa
3	Sekretariat Daerah	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
4	Sekretariat Daerah	Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
5	Sekretariat Daerah	Pembinaan Berkelanjutan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
6	Sekretariat Daerah	Pembinaan dan Fasilitasi Sistem Persandian
7	Sekretariat Daerah	Pembinaan Gelar Peralatan Sandi di Instansi Pemerintah
8	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

9	Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pembinaan/Fasilitasi Pelaksanaan Dana Alokasi Desa
11	Dinas Pertambangan Dan Energi	Pembinaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi Peningkatan Wawasan di Bidang Pertambangan dan Energi

ASB-037
PEMBINAAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Non-Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk pembinaan / pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat / organisasi yang dibina

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 220.975,00 per Jumlah orang yang dibina, per Durasi pembinaan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp. 220.975,00 x Jumlah orang yang dibina x Durasi pembinaan dalam bulan)

Tabel 37. Batasan Alokasi Objek Belanja :

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,23%	0,00%	16,34%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,14%	0,26%	2,02%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,24%	0,00%	6,24%
4	Belanja Jasa Kantor	11,06%	0,00%	22,52%
5	Belanja Cetak Penggandaan	1,99%	0,00%	4,62%
6	Belanja Makan dan Minum	13,38%	0,00%	37,51%
7	Belanja Perjalanan Dinas	64,97%	13,99%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

Catatan :

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja Bahan Material, Sewa, Pakaian Kerja, dan Barang yang diserahkan kepada masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan ASB di atas memerlukan belanja Bahan Material, Sewa, Pakaian Kerja, dan Barang yang diserahkan kepada masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan sendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Non-Pegawai yang Dibina	225 Orang	2000 Orang
Durasi Pembinaan	1 bulan	12 bulan

Contoh Kegiatan ASB 037:

NO.	SKPD	KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
4	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
5	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Pendampingan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan-Environment Healt Risk Assesment (PPSP-EHRA)
6	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pembinaan Keluarga Berencana
7	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kualitas Keterampilan Perempuan
8	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pembinaan dan Evaluasi P2WKSS dan GSI
9	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok BKB
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyakit Sosial
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Pembinaan kemampuan teknologi industri

NO.	SKPD	KEGIATAN
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Pembinaan dan operasional Dekreasda
16	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pembinaan Organisasi kepemudaan
17	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pembinaan Partai Politik dan LSM
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Pengembangan PPK
20	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Pengembangan PPK
22	Dinas Perdagangan Dan Pasar	Pembinaan / operasi penertiban alat ukur/ tera ulang
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pembinaan dan Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
25	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pembinaan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

PARAF K^{1,00} 04,

PENJABA UPATI KOTABARU



H. ISRA